BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia dalam berinteraksi sering kali tidak bisa menghindari benturan kepentingan di antara mereka. Konflik yang muncul dapat menyebabkan kerugian, karena biasanya disertai dengan pelanggaran hak dan kewajiban dari satu pihak terhadap pihak lain. Konflik semacam ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, melainkan memerlukan mekanisme Hukum untuk penyelesaiannya. Dalam situasi seperti ini, Hukum menjadi sangat penting. Seperti pernyataan “Dimana ada masyarakat, disana ada Hukum”. Hukum memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa Hukum, kehidupan manusia akan kacau dengan kekuatan sebagai penentu kemenangan.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia diatur oleh berbagai Norma Hukum. Menurut Gustav Radbruch ada tiga tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.² Salah satu bentuk Hukum yang dikenal adalah Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Kedua jenis Hukum ini memiliki berbagai aturan yang harus dipatuhi oleh manusia sebagai subjek Hukum, termasuk aturan

¹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 2

² M. Jordan Pradana, Syofyan Nur, and Erwin Erwin, “Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 149, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9615>.

yang melarang dan yang harus dijalankan. Salah satu perbuatan yang dilarang dalam Hukum ini adalah Tindak Pidana Perjudian.

Perjudian telah menjadi masalah sosial dan Hukum yang kompleks di Indonesia. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai dampak jangka panjang terhadap individu dan komunitas. Dari sudut pandang moral, perjudian sering kali bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sementara beberapa individu mungkin mendapatkan keuntungan finansial dalam jangka pendek, justru banyak yang mengalami kerugian secara signifikan, sehingga berpotensi merusak perekonomian keluarga dan meningkatkan angka kemiskinan.

Pada hakikatnya perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara serta ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas.³

Tindak pidana perjudian di Indonesia saat ini saja masih banyak terjadi terbukti banyaknya kasus-kasus tindak pidana perjudian atau tindak kejahatan terjadi, walaupun ada hukum dan sanksinya yang berlaku dalam masyarakat. Dengan berbagai macam bentuk perjudian yang sudah begitu merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun

³ Mohammad Ilham Safrudin, Cipto Kuncoro, Rusydi, "Pertanggungjawaban Hukum Pengepul Dalam Perjudian Online (Analisis Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Lmg)", *Law Specialist: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2024. <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/lawspecialist/article/download/8090/3420>

secara sembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat cenderung bermasa bodoh dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, tidak melanggar hukum, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan.

Dalam konteks ini, Perjudian termasuk dalam Tindak Pidana yang diatur baik oleh Hukum Pidana Positif maupun Hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya, terutama dalam hal penegakan hukum dan penerapan sanksi. Walaupun perjudian itu telah dilarang oleh agama Islam, dan Pemerintah dengan segala macam hukumannya tetapi sampai sekarang masih ada orang yang membuka arena perjudian.

Dalam Islam perjudian juga di atur dalam Al-Qur'an pada surat Al-Maidah ayat 90-91 yang Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum *khamar*, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian memperoleh keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu.⁴

Berdasarkan dalil di atas dan juga terdapat hadist Nabi tentang *maisir* yaitu diantaranya yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah bersabda yang artinya "barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya."⁵ Maka dari itu para ulama berpendapat bahwa

⁴ Al- Qur'an, 2019. hlm. 165

⁵ Muhammad Syafii Hadzami , *Dalil Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan lain lain)*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta jilid 6, 2010, hlm. 254

maisir (judi) itu hukumnya haram, seperti yang dikemukakan oleh salah satu ulama yaitu Yusuf Qardawi, menurut beliau permainan yang mengandung taruhan adalah haram.⁶ Adapun mengenai sanksi dari *maisir* juga termasuk dalam perbuatan *jarimah*, yaitu perbuatan terlarang yang dapat diancam dengan *ta'zir*, berupa hukuman cambuk yang diberikan kepada pelaku karena melakukan perbuatan *maisir*.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja, oleh karena itu Islam menyuruh untuk menjauhi judi, karena dengan adanya permainan judi itu akan membuat seseorang berangan-angan, apabila ia menang maka akan menjadi kaya-raya tanpa usaha dan kerja keras.⁷ Sedangkan apabila ia kalah, maka kerugiannya itu mendorong pihak yang kalah untuk mengulangi lagi dengan pengulangan yang kedua, sehingga dapat menutup kerugiannya yang pertama. Judi juga dapat menjadikan orang yang bersangkutan mengorbankan segala sesuatu, hingga terhadap kehormatan, keyakinan, dan bangsanya demi terlaksananya pekerjaan yang sia-sia ini.

Khamar dan *maisir*/judi diharamkan sebagai tindak preventif agar tidak terjadi *'Adawah*/permusuhan dan *Baghdla*'/saling membenci, *Washaddun'an*

⁶ Yusuf Qardhawi, (*Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*), Terj. Wahid Ahmadi Halal dan Haram dalam Islam, Era Intermedia, Surakarta, 2007, hlm. 423.

⁷ Abul A'la Almaududi, "*Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Kitab Undang-undang hukum pidana*, Program Studi Perbandingan Madzhab Hukum" , 2016, hlm. 7

zikhriyyah/lalai kepada Allah dan *Anisshalah*/meninggalkan shalat. Itulah yang menjadi tujuan inti larangan tersebut.⁸

Menurut perspektif hukum positif sendiri, tindak pidana perjudian ini sangat tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita yaitu diatur dalam KUHP pasal 303 tentang penetiban perjudian:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak banyaknya dua puluh lima Juta Rupiah, barang siapa dengan tidak berhak:
 - a. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pecahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan judi
 - b. Dengan sengaja mengadakan member kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatanitu.
 - c. Turut main judi sebagai matapencaharian.
- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.
- 3) Main judi berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untunguntungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai dan atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perombakan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, dan juga segala pertaruhan lain.⁹

Adapun bentuk-bentuk perbuatan pidana yang termasuk dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis tentang perjudian adalah setiap perbuatan atau permainan dalam bentuk apa saja tanpa terkecuali yang di dalamnya melibatkan pertaruhan untuk mendapatkan keuntungan berlebih termasuk kedalam kategori perbuatan

⁸ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?*, Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQur'an (IIQ), Jakarta, 1987, hlm. 24

⁹ *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Indonesia 5, no. 8, 2021, hlm. 1–143.

permainan judi. Tidak terkecuali terhadap permainan-permainan yang dianggap biasa oleh masyarakat tetapi diselipkan pertaruhan didalamnya maka itu termasuk dalam bentuk perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana oleh pihak yang berwajib.¹⁰

Dalam hal ini bentuk-bentuk perbuatan permainan perjudian adalah setiap permainan yang menggunakan pertaruhan di dalamnya. Maka sudah seharusnya Pemerintah tanggap dan segera membuat perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang “larangan praktik perjudian” apapun itu bentuk perbuatannya dengan lebih tegas, khususnya larangan dalam pemberian izin judi di tempat umum atau di kota-kota dan di tempat-tempat pemukiman penduduk, agar negara kita sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana masyarakatnya yang religius tetap terjaga.

Keadaan demikian ini merupakan dilema sosial yang harus dihadapi dan dihentikan. Padahal menurut hukum, penjudi yang tertangkap dapat dihadapkan ke meja hijau berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa “semua bentuk perjudian dikategorikan sebagai tindak kejahatan”,¹¹ dan ini dipertegas lagi oleh Intruksi presiden No. 7 Tahun 1981 yang mulai berlaku

¹⁰ Gerald Waney, “*Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis Kuhp)*”, Lex Crimen, 2016, hlm. 1.

¹¹ Adon Nasrullah Jamaluddin, *Dasar-dasar patologi Sosial*, Bandung, CV Pusaka Setia, 2015, hlm. 161-162

sejak tanggal 1 April 1981 bahwa “segala bentuk perjudian dilarang di Indonesia.”¹²

Namun, terlepas dari pelarangan yang sudah diatur secara jelas, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perjudian masih terus ada dan berkembang dengan berbagai cara. Permainan judi tidak hanya dilakukan secara terang-terangan, tetapi juga secara sembunyi-sembunyi, bahkan kini semakin canggih dengan hadirnya perjudian online yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahwa “setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik dengan muatan perjudian dapat dikenai pidana.”¹³

Sementara itu, Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Perjudian menetapkan sanksi pidana untuk tindak perjudian tanpa izin, termasuk penawaran, partisipasi, dan penggunaan kesempatan Judi. Pelanggar dapat dikenai pidana penjara dan/atau denda, dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak jika tindak pidana dilakukan dalam menjalankan profesi.¹⁴

¹² Ridwan Daus, *Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif* (Analisis Putusan No. 273/Pid.B/2013/PN.BJ), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, hlm. 3

¹³ Ernita Kudadiri, Andi Najemi, Erwin, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online”, *Pampas : Journal of Criminal Law*, V 4, No. 1, 2023, hlm. 2. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24607?>

¹⁴ Ahmad Ghifari Alhasani, Ridwan, Reine Rofiana, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku pembuat konten Perjudian Online berbasis Live Streaming”, *Pampas : Journal of Criminal Law*, V 5, No. 1, 2024, hlm.110, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/31489>

Fenomena ini menjadi bukti bahwa penegakan hukum menghadapi tantangan besar, terutama dalam menghadapi adaptasi bentuk-bentuk perjudian yang terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi.

Salah satu masalah yang sering terjadi adalah kurangnya pengawasan dari aparat hukum di beberapa daerah, yang memungkinkan perjudian tetap berlangsung.¹⁵ Tidak jarang ditemukan oknum tertentu yang justru terlibat dalam melindungi praktik-praktik perjudian, sehingga menciptakan siklus yang sulit diputus. Di sisi lain, lemahnya sanksi dan pelaksanaan hukum juga memberikan peluang bagi para pelaku untuk mengulangi tindakannya tanpa rasa takut. Kondisi ini semakin mempertegas perlunya evaluasi dan pembaruan terhadap aturan hukum yang ada, baik dalam kerangka hukum positif maupun pendekatan berdasarkan hukum Islam.

Salah satu kelemahan mendasar dari sistem pemidanaan kita saat ini adalah pendekatannya yang terlalu fokus pada aturan hukum saja, tetapi kurang memasukkan nilai-nilai keagamaan dan ajaran moral. Padahal, untuk kasus seperti perjudian yang erat kaitannya dengan masalah akhlak, dibutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya memberi hukuman, tetapi juga mendidik pelaku agar sadar dan mencegah mereka mengulangi perbuatannya. Ketika hukum tidak memasukkan nilai agama dalam pelaksanaannya, maka tujuan untuk

¹⁵ Jamal Ruddin Ginting, Syofiati Lubis, “Analisis Yuridis Pp No. 9 Tahun 1981 Menurut Perspektif Fiqh Jinayah Di Desa Naman Teran Dan Desa Sukandebi Kec. Naman Teran Kab. Karo Terhadap Perjudian Dadu” *Law Gorontalo Review*, no. 2, 2024, hlm. 314–26. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/3763>

membuat pelaku jera dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik tidak akan tercapai dengan maksimal.

Hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis hukuman yang diberikan, seperti *ta'zir*, bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memperbaiki akhlak pelaku.¹⁶ *Ta'zir* adalah bagian dari hukuman dalam Hukum Pidana Islam terhadap perbuatan *Jarimah* yang telah dilakukan seseorang. Pendekatan ini berbeda dengan Hukum Pidana Positif yang lebih fokus pada penghukuman dalam bentuk denda atau kurungan. Meski demikian, kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah tindak pidana perjudian dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.

Pentingnya pembahasan mengenai tindak pidana perjudian tidak hanya sebatas pada penegakan hukum semata, tetapi juga mencakup aspek edukasi dan kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu memahami bahwa perjudian, dalam bentuk apa pun, memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar kerugian materi. Perjudian dapat merusak moral, memicu konflik sosial, dan menghancurkan fondasi keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berusaha untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai perbedaan penanganan perjudian dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam, tetapi juga menawarkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan secara nyata.

¹⁶ Muhammad Al-Musdhaqiron, "Implementasi Ta'zir dalam Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Santri di Pondok Roudlatul Rohmaniyah Sukolumajang, *Jurnal Dakwah dan komunikasi Islam*, Vol.3, No.2, 2017, hlm. 166, <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/dakwatuna/article/view/275/201>

Penelitian ini juga akan melihat bagaimana efektivitas hukum yang sudah ada, baik dalam hukum pidana positif maupun hukum islam, dalam memberikan solusi atas permasalahan ini. Sebagai contoh, meskipun Pasal 303 KUHP memberikan ancaman pidana yang cukup berat bagi pelaku perjudian, pelaksanaannya sering kali tidak maksimal. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya angka penuntutan terhadap pelaku perjudian besar, yang sering kali lolos karena kurangnya bukti atau keterbatasan aparat penegak hukum.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan sinergi antara hukum positif dan hukum islam dalam menangani tindak pidana perjudian. Sinergi ini tidak hanya akan memperkuat penegakan hukum, tetapi juga mampu menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, sehingga mampu mengatasi akar masalah perjudian di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dari latar belakang di atas, maka dapat didefinisikan sebuah permasalahan yang penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam di Indonesia terhadap perjudian?
2. Apa kelebihan dan kekurangan dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam di Indonesia dalam mengatur tindak pidana perjudian?

C. Tujuan Penelitian

Dari paparan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam di Indonesia dalam mengatur tindak Pidana Perjudian.
2. Untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam memberikan pengaturan terhadap tindak pidana perjudian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian yang dilakukan berupa:

- a. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk akademis, sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum dalam menambah bahan Hukum Pidana, khususnya tentang tinjauan yuridis hukum pidana positif dan hukum pidana Islam di Indonesia terhadap perjudian serta sebagai bahan masukan bagi pihak terkait.
- b. Secara praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah:

- 1) Dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bacaan bagi pihak yang memerlukan;
- 2) Menambah literatur perpustakaan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami maksud dari penelitian ini, perlu diuraikan beberapa penafsiran dan definisi yang merupakan hubungan antara konsep-konsep khusus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁷

2. Hukum Pidana Positif

Hukum pidana positif adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.¹⁸ Kata-kata hukum pidana pertama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut

¹⁷ Nur Rima Cessio Magistri, “Tinjauan yuridis terhadap perlindungan Hukum korban Tindak Pidana Penusukan dalam Peradilan Pidana” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 82-101, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/7212>

¹⁸ Cynthia Alkalah, *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, 2023. hlm. 7

berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan.

Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.¹⁹

3. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih Jinayah. Fikih Jinayah terdiri dari dua kata. . Fikih secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham²⁰.

Menurut istilah yang dikemukakan oleh Abdul wahab Khallaf

“Fikih adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan.”

¹⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017. hlm. 1

²⁰ Said Aqil Munawar, Fatahuddin Aziz Siregar, Risalan Basri Harahap, Yuni Fauziah, Tarolo Julu, *Fikih Jinayah Kontemporer Telaah Histrois, Perkembangan Dan Penerapan Qanun*, Semesta Aksara, vol. 7, 2024. hlm.1

Sedangkan menurut istilah, jinayah yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah “Suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.”²¹

Adapun sumber hukum pidana islam adalah asal (Tempat pengambilan) Hukum Pidana Islam. Allah telah menentukan sendiri sumber hukum (agama dan ajaran) islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Yaitu terdiri dari :

a. *Al-Qurán*

Al-Qurán merupakan sumber pokok (primer) syariat Islam, di dalamnya dijelaskan tentang dasar-dasar syariat, akidah-akidah secara terperinci, dan ibadah serta peradilan secara global. Posisinya dalam syariat Islam seperti posisi Undang-undang dalam hukum positif . Al-Qurán merupakan panutan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang sesudahnya, sehingga menjadi sumber yang pokok (primer).

b. *As-sunnah*

As-sunnah adalah sumber Hukum Pidana Islam yang kedua setelah Al-Qurán. As-sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad SAW. Pengertian yang dimaksud As-Sunnah adalah sesuatu perbuatan yang beberapa kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian terus menerus diikuti oleh

²¹ *Ibid.* Hal.4

sahabat dan dinukilkan (dipindahkan) kepada kita dari zaman ke zaman dengan mutawir.

c. Ijma'

Ijma' secara bahasa berarti bertekad bulat untuk melaksanakan sesuatu, bersepakat atas sesuatu. Berdasarkan pengertian bahasa ini, bisa dikatakan bahwa apabila seseorang bertekad bulat untuk melaksanakan sesuatu, maka ia dapat dikatakan berijma', atau suatu kelompok orang bersepakat terhadap suatu perkara maka bisa dikatakan Ijma'.

d. Qiyas

Qiyas menurut Bahasa adalah mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya. Qiyas menurut Istilah adalah mengembalikan (menyamakan) cabang kepada pokok, karena ada illat atau sebab yang mengumpulkan keduanya kedalam suatu hukum. Atau pengertian lain Qiyas adalah menetapkan suatu hukum yang tidak disebut dalam lafadh, disamakan seperti apa yang disebutkan dalam lafadh itu karena ada illat yang mengumpulkan keduanya.

4. Perjudian

Perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP yang menyatakan bahwa tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi

bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan.²² Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.²³

Menurut Hukum Pidana Islam, Perjudian(*masyir*) diharamkan secara tegas berdasarkan dalil Al-Qur'an dalam QS. Al-Maidah: 90-91. Perjudian adalah aktivitas yang mengandalkan spekulasi tanpa dasar yang jelas, mengandung unsur ketidakpastian(*gharar*), dan merugikan pihak lain.

F. Landasan Teori

Sehubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini yakni tinjauan yuridis hukum pidana positif dan hukum pidana Islam di Indonesia terhadap perjudian, maka hal-hal yang perlu dijadikan landasan teori dalam penelitian ini adalah teori hukum, dalam hal ini teori hukum yang digunakan untuk menganalisis temuan / data oleh penulis adalah teori perbandingan hukum (*Comparative Law Theory*), teori hukum positif (*legal positivism*) dan teori Kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*).

1. Teori Perbandingan Hukum (*Comparative Law Theory*)

Teori perbandingan hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami persamaan dan perbedaan antara sistem hukum yang berbeda.

²² *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Indonesia, 2021

²³ Uah Maspuroh Rina Amelia, Slamet Triyadi, "Peran Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, no. 23, 2023, hlm. 119. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/8794>

Menurut Konrad Zweigert dan Hein Kötz dalam *Introduction to Comparative Law*, teori ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dari berbagai sistem hukum dengan cara menganalisis bagaimana sistem-sistem tersebut menangani masalah yang sama.²⁴ Dalam konteks skripsi ini, teori perbandingan hukum relevan untuk membandingkan hukum pidana positif di Indonesia dengan hukum pidana Islam dalam mengatur dan melarang perjudian.

Pendekatan perbandingan hukum dapat dilakukan melalui berbagai metode, salah satunya adalah metode fungsional. Metode ini mengkaji bagaimana dua sistem hukum yang berbeda menangani masalah yang sama, seperti larangan perjudian, dengan tujuan menemukan solusi terbaik berdasarkan pengalaman dari masing-masing sistem. Selain itu, pendekatan kontekstual juga penting, karena membantu memahami bagaimana faktor sosial, budaya, dan agama memengaruhi perbedaan aturan hukum antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam, larangan perjudian didasarkan pada nilai-nilai syariah yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perilaku yang merusak, baik secara moral maupun spiritual. Dalil Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Maidah: 90-91, dengan tegas menyatakan bahwa perjudian adalah perbuatan setan yang dapat menimbulkan

²⁴ Flori ratna Sari, "Perbandingan Hukum Indonesia Dan Inggris Berdasarkan Uncitral Model Law Terhadap Asas Ketertiban Umum Putusan Arbitrase Internasional," 2021..

permusuhan dan kebencian di antara manusia serta menjauhkan mereka dari mengingat Allah.²⁵ Larangan ini juga didukung oleh hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengecam segala bentuk perjudian. Berdasarkan teori *Maqāsid al-Sharī'ah*, yang menjadi landasan hukum pidana Islam, larangan perjudian bertujuan untuk melindungi lima kebutuhan dasar manusia (*daruriyyat al-khams*), yaitu agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.²⁶

Sebaliknya, hukum pidana positif di Indonesia tidak mendasarkan larangan perjudian pada nilai-nilai agama, melainkan pada pertimbangan praktis untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah dampak negatif sosial-ekonomi. Perbedaan filosofi ini mencerminkan perbedaan pendekatan antara hukum pidana positif yang bersifat sekuler dan hukum pidana Islam yang berbasis pada nilai-nilai moral dan spiritual.

Perbandingan antara kedua sistem hukum ini tidak hanya relevan untuk memahami perbedaan filosofis, tetapi juga untuk mengevaluasi efektivitas masing-masing sistem dalam menangani perjudian di Indonesia. Hukum pidana Islam, misalnya, menekankan pendekatan preventif dengan mengajarkan nilai-nilai moral dan agama kepada masyarakat, sementara hukum pidana positif lebih berfokus pada pendekatan represif melalui

²⁵ *Al-Qur'an*. Hal. 165

²⁶ Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha," *Jurnal Hukum Responsif*, no.6, 2019, hlm. 32–43. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/419>

ancaman pidana dan denda. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki kelebihan dan kelemahan yang dapat saling melengkapi jika diterapkan secara terpadu.

Melalui teori perbandingan hukum, hal ini berupaya untuk menjembatani perbedaan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam konteks larangan perjudian.

2. Teori Hukum Positif (*Legal Positivism*)

Teori hukum positif merupakan salah satu teori utama dalam filsafat hukum yang berfokus pada hukum sebagai suatu sistem aturan yang bersifat formal, objektif, dan ditetapkan oleh otoritas yang sah. Menurut H.L.A. Hart dalam *The Concept of Law*, hukum dapat dipahami sebagai kumpulan aturan yang mengatur perilaku manusia, di mana aturan tersebut terdiri atas aturan primer yang secara langsung mengatur tindakan manusia dan aturan sekunder yang memberikan legitimasi terhadap keberadaan aturan primer tersebut²⁷. Sebagai contoh, dalam konteks hukum pidana, aturan primer dapat berupa larangan perjudian, sementara aturan sekunder memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan dan menegakkan larangan tersebut melalui institusi hukum.

Hans Kelsen, melalui *Pure Theory of Law*, menekankan bahwa hukum adalah norma yang bersifat hierarkis, di mana norma hukum yang

²⁷ Nurainun Mangunsong, *The Concept of Law by H.L.A. Hart*, Law Review, 1997, hlm. 1–10.

lebih tinggi memberikan validitas terhadap norma yang lebih rendah.²⁸ Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum harus dipisahkan dari moralitas atau nilai-nilai agama agar dapat berlaku secara universal dan objektif. Dalam konteks Indonesia, hukum pidana positif yang mengatur perjudian, seperti Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, adalah bentuk konkret dari implementasi teori hukum positif. Aturan ini melarang perjudian dengan alasan menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi yang merugikan.

John Austin, salah satu pendukung utama teori hukum positif, dalam *The Province of Jurisprudence Determined*, mendefinisikan hukum sebagai perintah dari penguasa yang berdaulat yang diberlakukan melalui ancaman sanksi.²⁹ Dengan demikian, hukum pidana positif di Indonesia terkait perjudian dapat dipahami sebagai perintah negara untuk melarang aktivitas perjudian yang dianggap merusak moral masyarakat dan stabilitas sosial. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai alat pengendalian sosial yang tidak memerlukan justifikasi moral atau agama, melainkan berfokus pada kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

²⁸ Muhammad Arif Setiawan and Mahrus Ali, *Kapita Selekta Teori Hukum*, 2021. hlm. 35

²⁹ Afreiza Octaguna., “Konsep Hukum Menurut John Austin,” *Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia*, 2023, hlm. 10
<https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/159>

Ciri khas hukum positif adalah sifatnya yang normatif, sekuler, dan imperatif. Normatif berarti hukum positif hanya berfokus pada aturan yang tertulis, seperti yang tercantum dalam undang-undang, tanpa mempertimbangkan aspek moralitas. Sekuler berarti hukum ini tidak terikat pada agama tertentu, sehingga dapat diterapkan pada masyarakat yang heterogen seperti Indonesia. Sementara itu, sifat imperatifnya menekankan bahwa hukum harus ditaati oleh seluruh masyarakat, dengan sanksi sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran. Dalam kasus perjudian, pendekatan ini terlihat pada ancaman pidana bagi individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas perjudian, baik secara langsung maupun melalui penyediaan fasilitas perjudian.

Relevansi teori hukum positif terhadap perjudian sangat signifikan dalam konteks Indonesia. Regulasi perjudian dalam Pasal 303 KUHP dirancang untuk melarang aktivitas yang dianggap merusak ketertiban umum dan berdampak negatif terhadap masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Selain itu, larangan ini diperluas melalui undang-undang lain, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), untuk mengatasi tantangan baru yang muncul dari perjudian daring. Dengan demikian, teori hukum positif memberikan kerangka normatif yang kuat untuk memahami dasar hukum larangan perjudian di Indonesia.

Namun, teori hukum positif tidak lepas dari kritik. Salah satu kritik utama adalah bahwa pendekatan ini sering kali dianggap kurang

memperhatikan nilai-nilai moral dan budaya lokal, yang sangat penting dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Selain itu, dalam konteks perjudian online, penerapan hukum positif menghadapi tantangan teknis, seperti keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang dilakukan secara virtual. Kritik ini menunjukkan bahwa meskipun teori hukum positif memberikan dasar yang kokoh untuk regulasi perjudian, penerapannya tetap memerlukan penyesuaian dengan dinamika sosial dan teknologi yang terus berkembang.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah Kebijakan dapat diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*Politiek*” (Belanda).³⁰ Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “Politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.³¹

Menurut Marc Ancel, kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yaitu :

Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-undang, tetapi juga kepada Pengadilan

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008, hlm. 26

³¹ Herry Lius Dodik Haryono, Hafrida, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Diversi Pada Tindak Pidana Anak,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2021, hlm. 16. <https://repository.unja.ac.id/22594/>

yang menerapkan Undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan Pengadilan.³²

Definisi Kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, “Politik Hukum” merupakan suatu upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan kondisi dan situasi pada suatu waktu.³³ Selanjutnya, Sudarto mengemukakan bahwa dalam rangka pelaksanaan “Politik Hukum Pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan Pidana yang paling baik dalam arti memenuhi standar keadilan dan memiliki manfaat yang optimal.³⁴ Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan Perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Ditinjau dari aspek penegakan hukum pidana, kebijakan formulasi/legislatif merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum pidana dan merupakan tahap awal sekaligus merupakan sumber landasan bagi proses penegakan hukum selanjutnya yaitu tahap aplikatif/penerapan serta tahap eksekusi/administratif.

Kebijakan pidana merupakan salah satu cara atau alternatif dalam penyelesaian masalah kejahatan karena pada dasarnya politik hukum

³² Barda Nawawi Arief, *Ibid.* hlm. 23

³³ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 159

³⁴ *Ibid*, hlm. 161

adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dihendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakannya.³⁵

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus utama pada perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap perjudian, dengan tujuan memberikan perspektif baru yang lebih mendalam dan relevan. Orisinalitas penelitian ini terletak pada beberapa poin penting yang membedakannya dari penelitian sebelumnya.

1. Skripsi milik Nasori dengan judul “Perjudian dalam pandangan Hukum pidana Islam dan KUHP (Kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang perjudian dengan menggunakan pendekatan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Namun, yang membedakan adalah penelitian Nasori lebih berfokus pada analisis terhadap putusan pengadilan terkait perjudian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada kajian perbandingan yuridis antara

³⁵ T.Subarsyah Sumardika, *Penegakan Hukum (Sebuah pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Kencana Utama, Bandung, 2010, hlm. 90

hukum pidana positif dan hukum pidana Islam di Indonesia secara umum terhadap tindak pidana perjudian.

2. Skripsi milik Reniati Sumanta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas perjudian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Namun, yang membedakan adalah penelitian Reniati lebih berfokus pada perbandingan regulasi lokal, yaitu Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada kajian yuridis terhadap hukum pidana positif dan hukum pidana Islam di Indonesia secara keseluruhan terkait tindak pidana perjudian.
3. Skripsi milik Abul A'la Almaududi dengan judul “Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kriteria dan Ancaman Perjudian” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang perjudian dalam perspektif hukum pidana Islam dan KUHP. Namun, bedanya, skripsi ini lebih fokus pada pembahasan mengenai kriteria dan ancaman hukuman terhadap perjudian menurut hukum

pidana Islam dan KUHP. Sementara itu, penelitian saya lebih menyoroti perbandingan yuridis antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam di Indonesia dalam mengatur tindak pidana perjudian secara umum.

Dengan fokus dan pendekatan yang saya ambil, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata, baik secara akademis untuk memperkaya literatur hukum, maupun secara praktis untuk memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan hukum di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa hukum atau peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian hukum kepustakaan. Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum, serta pandangan para ahli.³⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terkait tindak pidana perjudian di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga memahami filosofi di balik aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kedua sistem tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, pendekatan-pendekatan yang digunakan sangat penting untuk memastikan analisis yang mendalam dan relevan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*),

³⁶ Deta Merly Oktavianti I Ketut Seregig, Suta Ramadan, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan Dalam Jabatan," *Pampas Journal Of Criminal Law*, no. 1, 2022, hlm. 103. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17071>

pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁷

Berdasarkan pendapat tersebut, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

a. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif, seperti Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP dan UU ITE. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji aturan hukum Islam yang melarang perjudian, terutama yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih.

b. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam dalam konteks larangan perjudian. Penulis berusaha memahami persamaan, perbedaan, dan relevansi masing-masing sistem hukum terhadap penanganan perjudian di Indonesia.

c. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menggali konsep-konsep dasar yang melandasi larangan perjudian dalam kedua sistem

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, Edisi Pertama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006

hukum tersebut. Dalam hukum pidana positif, konsep yang dianalisis adalah ketertiban umum dan perlindungan sosial, sedangkan dalam hukum pidana Islam, konsep yang dikaji adalah *maqasid al-shariah* dan nilai-nilai moral dalam syariah Islam.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui berbagai sumber yang relevan. Sumber-sumber tersebut terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, serta sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, putusan pengadilan yang relevan, baik yang berkaitan dengan kasus perjudian dalam hukum pidana positif maupun yang menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam, juga menjadi bahan utama penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur, buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas tentang hukum pidana positif, hukum pidana Islam, serta perbandingan hukum. Penelitian ini juga memanfaatkan karya-karya ilmiah yang membahas *maqasid al-shariah*, hukum Islam tentang perjudian, dan analisis kritis terhadap implementasi hukum pidana positif di Indonesia.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu ensiklopedia, kamus hukum, dan bahan referensi lainnya yang mendukung pemahaman konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menyusun, menyederhanakan, dan menjelaskan data berdasarkan kategori tertentu.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penulis memulai dengan memahami aturan-aturan hukum secara umum dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, kemudian menarik kesimpulan yang lebih spesifik terkait penerapan aturan tersebut terhadap larangan perjudian di Indonesia. Penulis juga menggunakan pendekatan analitis untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem hukum serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil perbandingan tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman secara menyeluruh terhadap skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang yang menjelaskan alasan dan urgensi dari penelitian ini. Selanjutnya, bab ini juga memuat perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta diakhiri dengan sistematika penulisan sebagai gambaran umum isi skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini penulis menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian, seperti tinjauan tentang perjudian dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, teori-teori hukum yang digunakan dalam penelitian, serta landasan filosofis dari larangan perjudian dalam kedua sistem hukum tersebut.

Bab III Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari skripsi yang akan membahas permasalahan berdasarkan perumusan masalah. Dalam bab ini, penulis menganalisis dan membandingkan larangan perjudian menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, baik dari segi filosofis, normatif, maupun implementasinya. Penulis juga membahas ketentuan sanksi hukuman perjudian dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam dengan menyoroti kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem serta memberikan rekomendasi yang konstruktif.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Penulis juga menyampaikan saran yang relevan, baik untuk pengembangan regulasi maupun untuk penelitian lebih lanjut.